



ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL FOOD SECURITY AGENCY FOR THE 2022-2024 FISCAL YEARS BASED ON THE VALUE FOR MONEY CONCEPT

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024 BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Maharani Nur Ma'virroh¹, Lutfi Nurcholis²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung

E-mail: maharaninm12@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Maharani Nur Ma'virroh
maharaninm12@gmail.com

Key words:

Value for Money, Financial Performance, Economy, Efficiency, Effectiveness and Food Security Agency of Central Java

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1061 - 1077

ABSTRACT

Value for Money (VfM) is a concept that emphasizes the importance of managing public finances economically, efficiently, and effectively to achieve optimal results. This study aims to analyze the financial performance of the Food Security Agency of Central Java for the fiscal years 2022-2024 using the Value for Money approach. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) and Government Agency Performance Reports (LKjIP) from Food Security Agency of Central Java Province in 2022-2024. The results show that during 2022-2024, the financial management of the Food Security Agency was categorized as economical, with budget realization rates consistently above 95 percent each year. Efficiency levels varied due to differences in program implementation and resource allocation, while the effectiveness aspect indicated that most performance indicators exceeded their targets. Overall, the financial performance of the Food Security Agency of Central Java Province reflects the implementation of Value for Money principles, although improvements in inter-program efficiency are still needed to enhance accountability and the quality of regional financial management.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Maharani Nur Ma'virroh
maharaninm12@gmail.com

Kata kunci:

Value for Money, Kinerja Keuangan, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1061 - 1077

ABSTRAK

Value for Money (VfM) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 berdasarkan konsep *Value for Money*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022-2024 tergolong ekonomis dengan tingkat realisasi anggaran di atas 95 persen setiap tahunnya. Tingkat efisiensi menunjukkan variasi antartahun akibat perbedaan pelaksanaan kegiatan dan alokasi sumber daya, sementara dari sisi efektivitas, sebagian besar indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencerminkan penerapan prinsip *Value for Money*, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek efisiensi antarprogram guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu indikator krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 283 ayat (1) yang menekankan asas efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, organisasi sektor publik mengemban amanah untuk mengelola sumber daya yang berasal dari rakyat demi kepentingan dan kesejahteraan publik. Namun, dalam praktiknya, sektor publik seringkali dihadapkan pada tantangan persepsi yang mengaitkannya dengan inefisiensi, pemborosan, atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Persepsi ini, sebagaimana disoroti oleh beberapa literatur yang menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2009). Reformasi dalam pengelolaan keuangan publik terus digalakkan, bergeser dari sekadar kepatuhan pada prosedur menjadi fokus pada realisasi atau hasil yang diciptakan dari setiap pengeluaran. Ini adalah esensi dari akuntabilitas publik, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan sebuah pilar fundamental atau pondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kemajuan suatu daerah, bukan hanya dalam

konteks pembangunan nasional yang di dalamnya tidak hanya menyangkut ketersediaan fisik pangan atau ada dan tidak adanya pangan saja, namun juga menyangkut aspek keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan yang merata serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di setiap wilayah Indonesia. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang harus terus diperkuat. Provinsi Jawa Tengah, dengan kekayaan sumber daya alam dan pertaniannya, memegang peranan penting sebagai salah satu "lumbung pangan nasional". Sepanjang tahun 2024, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan produksi padi dan jagung terbesar kedua di Indonesia dengan produksi padi mencapai 8,89 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi jagung mencapai 2,43 juta ton. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025). Kontribusinya dalam menjaga pasokan pangan di tingkat regional maupun nasional sangatlah signifikan. Namun, di balik peran strategis ini, Jawa Tengah juga menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengancam ketahanan pangan. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan yang lebih besar, sementara di sisi lain, terjadi penurunan luas lahan pertanian produktif. Isu demografi petani yang didominasi oleh generasi tua, dengan minimnya regenerasi dari kalangan milenial dan Gen Z, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas pangan yang tidak stabil, serta masih adanya daerah-daerah yang rentan pangan dan kasus stunting, semakin menambah kompleksitas persoalan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Prov. Jateng) hadir sebagai institusi pemerintah yang memiliki amanat dan tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan program, dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Dishanpan Prov. Jateng ini secara jelas diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan landasan hukum terbaru bagi operasional dinas. Setiap program yang dijalankan oleh Dishanpan Prov. Jateng, mulai dari upaya peningkatan diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan, hingga pengawasan keamanan pangan, memerlukan alokasi anggaran yang substansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dishanpan Prov. Jateng menunjukkan skala pengelolaan dana yang signifikan selama periode penelitian:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Dishanpan Prov. Jateng

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2022	43.528.909.000	41.632.036.996	95,64
2023	66.480.947.000	65.212.771.395	98,09
2024	39.805.906.000	38.747.206.024	97,34

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2022 hingga tahun 2024 atas besaran dana yang dikelola konsisten tinggi, di atas 95% setiap tahunnya. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini, meskipun secara finansial menunjukkan kinerja yang baik, tidak otomatis mencerminkan kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, bisa saja dicapai dengan penggunaan anggaran yang tidak efisien, atau pencapaian target kegiatan yang kurang maksimal. Inilah yang menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan peraturan dan realita pelaksanaan di lapangan. Di sinilah Konsep *Value for Money* (VfM) menjadi sangat relevan dan penting.

Konsep VfM merupakan sebuah pendekatan sistematis yang membantu dalam menilai seberapa baik Dishanpan Prov. Jateng telah mengelola sumber dayanya. Konsep ini melihat dari tiga sudut pandang utama antara lain: (1) ekonomis (hemat), yaitu sejauh mana input diperoleh dengan biaya yang wajar; (2) efisiensi (berdaya guna), yaitu perbandingan optimal antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan; dan (3) efektivitas (berhasil guna), yaitu sejauh mana realisasi kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan VfM memungkinkan identifikasi area pemborosan, inefisiensi proses, atau program yang belum memberikan hasil optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Dishanpan Prov. Jateng.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa konsep VfM ini sangat berguna dan relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan di berbagai instansi pemerintah daerah. Studi oleh Susi Maryanti dan Agus Munandar (2021) dengan judul *Analisis Value for Money* untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan bagaimana VfM digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, menyimpulkan tingkat ekonomis rata-rata sebesar 87,74%, Tingkat efisiensi rata-rata sebesar 101,18% dan tingkat efektivitas rata-rata 100,88%. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi dan Pipiet Niken Aurelia (2023) dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka memberikan hasil bahwa kinerja keuangan BPKAD Kab. Sikka dinilai ekonomis dan efisien, namun tidak efektif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tomi Hardiansyah (2024) dengan judul *Analisis Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut, kinerja keuangan Pemkab Sleman dinilai cukup ekonomis, efisien dan sangat efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, konsep *Value for Money* telah banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan di sektor publik. Namun demikian, masih jarang ditemukan penelitian yang mengkaji kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money* secara simultan dengan mengintegrasikan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat pemerintah daerah secara umum, tanpa melihat keterkaitan langsung antara efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dilaporkan dalam LKjIP. Kondisi ini menimbulkan celah penelitian (*research gap*), yaitu perlunya analisis yang tidak hanya menilai sejauh mana anggaran direalisasikan, tetapi juga mengaitkannya dengan hasil dan manfaat nyata program ketahanan pangan yang dijalankan oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada aspek penggunaan dua sumber data resmi pemerintah (LRA dan LKjIP) untuk menilai kinerja keuangan dari tiga dimensi *Value for Money* yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara terintegrasi. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada instansi teknis bidang ketahanan pangan, yang memiliki karakteristik kinerja berbeda dibandingkan dinas sektor ekonomi atau pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam memperkuat pengukuran kinerja keuangan berbasis akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan konsep *Value for Money* (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas), tanpa menguji hubungan kausal antarvariabel. Populasinya mencakup seluruh laporan keuangan dinas, sementara sampelnya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022–2024 yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan data anggaran, realisasi belanja, dan capaian kinerja. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen resmi instansi yang telah diaudit, dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap laporan keuangan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, karena penelitian berfokus pada analisis data faktual tanpa survei atau wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Laporan Keuangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024

Bagian ini menjelaskan data keuangan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) yang digunakan sebagai dasar dalam analisis *Value for Money* (VfM), yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dishanpan Jateng tahun 2022, 2023, dan 2024.

Kedua laporan tersebut merupakan dokumen akuntabilitas resmi yang menggambarkan perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta tingkat capaian sasaran kinerja organisasi. Data LRA mencerminkan sejauh mana anggaran digunakan secara ekonomis, sedangkan LkjIP menampilkan capaian indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di Dishanpan Jateng.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan hubungan antara input rencana (anggaran yang ditetapkan) dan input realisasi (realisasi belanja) dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan dokumen LRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perkembangan anggaran dan realisasi belanja selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data LRA Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2022	43.528.909.000	41.632.036.996	95,64
2023	66.480.947.000	65.212.771.395	98,09
2024	39.805.906.000	38.747.206.024	97,34

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, presentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari

presentase realisasi yang selalu di atas 95%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal.

Pada tahun 2022, tingkat realisasi mencapai 95,64%, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar. Hal ini menggambarkan kinerja yang ekonomis karena penggunaan dana sedikit lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 98,09%, yang berarti pelaksanaan kegiatan berjalan hampir sempurna sesuai rencana. Kenaikan ini juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja pada aspek pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam LKjIP.

Sedangkan pada tahun 2024, meskipun jumlah anggaran menurun dari tahun sebelumnya, realisasi mencapai 97,34%, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Data ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dinas telah memenuhi prinsip ekonomis dalam konsep *Value for Money*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang memuat capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. LKjIP disusun untuk menilai sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) berhasil mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direncanakan.

Data capaian kinerja dalam LKjIP ini menjadi dasar penting dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjadi bagian integral dalam analisis *Value for Money*.

Berdasarkan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2024, diperoleh ringkasan capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishanpan Jateng Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Skor PPH Konsumsi	88,44	94,4	106,74
2022	Nilai SKM	78,00	89,50	114,74
2023	Skor PPH Konsumsi	88,80	94,20	106,08
2023	Nilai SKM	76,00	91,50	120,39
2024	Indeks Ketahanan Pangan	83,00	85,34	102,81
2024	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	91,00	110,97

Berdasarkan data dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa:

1. Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 106,74%, yang berarti target konsumsi pangan masyarakat telah terlampaui. Hal ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan kualitas konsumsi pangan dan keberlanjutan ketersediaan bahan pangan pokok.

Selain itu, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 114,74%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik Dishanpan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan pelayanan terutama dalam bidang informasi ketahanan pangan dan layanan pengawasan keamanan pangan berjalan sangat efektif.

2. Tahun 2023

Pada tahun 2023 ini menjadi periode dengan peningkatan kinerja paling menonjol. Skor PPH Konsumsi tercatat 106,08%, mempertahankan tren capaian di atas target. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

Sementara itu, Nilai SKM mencapai 120,39%, merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun penelitian. Angka ini menggambarkan keberhasilan Dinas dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor ketahanan pangan. Capaian yang tinggi ini erat kaitannya dengan inovasi pelayanan digital, peningkatan koordinasi lintas bidang, dan optimalisasi pengawasan mutu pangan di tingkat kabupaten/kota.

3. Tahun 2024

Pada tahun 2024, fokus capaian kinerja Dishanpan bergeser pada indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Ketahanan Pangan mencapai 102,81%, menunjukkan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Jawa Tengah, baik dari aspek ketersediaan, akses, maupun konsumsi pangan masyarakat.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 110,97%, menandakan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pelayanan di Dishanpan telah memberikan hasil nyata terhadap penerima manfaat.

Peningkatan ini juga sejalan dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif, mencerminkan semakin kuatnya komitmen dinas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik.

Keterkaitan LRA dan LKjIP dalam Analisis Value for Money

Analisis *Value for Money* (VfM) pada penelitian ini mengintegrasikan dua aspek utama pelaporan pemerintah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di sektor publik.

1. Aspek Ekonomi (LRA)

LRA menjadi dasar penilaian ekonomi karena menggambarkan perbandingan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah realisasi belanja. Rasio ini menunjukkan seberapa hemat dan efisien sumber daya fiskal digunakan untuk mendanai program.

2. Aspek Efisiensi (LRA dan LKjIP):

Efisiensi dianalisis dengan membandingkan nilai capaian output yang dilaporkan dalam LKjIP dengan tingkat realisasi anggaran pada LRA. Semakin tinggi rasio antara output terhadap input, semakin efisien pengelolaan program yang dilakukan.

3. Aspek Efektivitas (LKjIP):

Efektivitas diukur berdasarkan perbandingan antara hasil (*outcome*) dan target (*output*). Data capaian indikator dalam LKjIP menunjukkan sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan hasil sesuai sasaran strategis dinas.

Dengan demikian, kombinasi antara data keuangan (LRA) dan data kinerja (LKjIP) memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan berbasis hasil (*performance-based financial management*) dan untuk mengukur sejauh mana prinsip *Value for Money* telah diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pendekatan *Value for Money* (VfM), yang meliputi tiga indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Analisis ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022–2024.

Pendekatan *Value for Money* digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara hemat (ekonomis), produktif (efisien), dan memberikan hasil maksimal (efektif).

Analisis Ekonomis

Rasio ekonomis mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya anggaran secara hemat, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan.

Menurut Mahmudi (2019), rasio ekonomis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Input Rencana: Jumlah Anggaran Belanja
- b. Input Realisasi: Jumlah Realisasi Belanja

Kriteria penilaian kinerja ekonomis adalah sebagai berikut:

- a. Jika rasio ekonomi > 100% berarti ekonomis
- b. Jika rasio ekonomi 85 s.d. 100% berarti cukup ekonomis
- c. Jika rasio ekonomi 65 s.d. 84% berarti kurang ekonomis
- d. Jika rasio ekonomi < 65% berarti tidak ekonomis

Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp43.528.909.000 dengan realisasi sebesar Rp41.632.036.996. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2022} = \frac{43.528.909.000}{41.632.036.996} \times 100\% = 104,55\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2022 tergolong ekonomis, karena rasio melebihi 100%, yakni 104,55%. Hal ini menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng mampu melaksanakan seluruh program dengan penghematan anggaran tanpa menurunkan capaian kinerja.

Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp66.480.947.000 dengan realisasi sebesar Rp65.212.771.395. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2023} = \frac{66.480.947.000}{65.212.771.395} \times 100\% = 101,94\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dikatakan ekonomis, karena rasio ekonomis melebihi 100%, yakni 101,94%. Selain itu, diketahui juga bahwa tingkat efisiensi pengeluaran semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan optimalisasi perencanaan belanja pada tahun 2023.

Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp39.805.906.000, dengan realisasi sebesar Rp38.747.206.024. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2024} = \frac{39.805.906.000}{38.747.206.024} \times 100\% = 102,73\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 juga dikatakan ekonomis, karena rasio ekonomis melebihi 100%, yakni 102,73%. Konsistensi efisiensi pembelanjaan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng memiliki perencanaan dan kontrol keuangan yang baik

Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai hubungan antara *input* (penggunaan anggaran) dan *output* (capaian program). Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Nilai Kinerja *Output*: Persentase Capaian Output
- Nilai Kinerja *Input*: Persentase Capaian Anggaran Belanja

Kriteria penilaian kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

- Jika rasio efisiensi < 90% berarti sangat efisien
- Jika rasio efisiensi 90 s.d. 99% berarti efisien
- Jika rasio efisiensi = 100% berarti cukup efisien
- Jika rasio efisiensi > 100% berarti tidak efisien

Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pada tahun 2022, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 110,74%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 95,64%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2022} = \frac{110,74\%}{95,64\%} \times 100\% = 115,81\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan kinerja tahun 2022 tergolong tidak efisien, karena rasio melebihi 100%, yakni 115,81%. Meskipun *output* atau kinerja pada tahun tersebut sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi penggunaan anggaran.

Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pada tahun 2023, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 113,24%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 98,09%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2023} = \frac{113,24\%}{98,09\%} \times 100\% = 115,44\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui rasio efisiensi pada tahun 2023 adalah 115,44%. Hasil ini menunjukkan tidak efisien karena rasio tersebut melebihi 100%, meskipun capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya. Faktor pendorongnya berasal dari peningkatan beban kegiatan dan biaya program yang tinggi di tengah realisasi *output* yang maksimal.

Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pada tahun 2024, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 106,89%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 97,34%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2024} = \frac{106,89\%}{97,34\%} \times 100\% = 109,81\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, hasilnya menunjukkan kondisi tidak efisien karena melebihi 100%, yakni 109,81%. Meskipun kinerja tahun 2024 cukup baik, terdapat indikasi bahwa peningkatan hasil belum proporsional dengan penggunaan sumber daya anggaran, sehingga efektivitas tinggi tidak selalu sejalan dengan efisiensi keuangan.

Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana hasil yang dicapai Dishanpan Jateng (*outcome*) sesuai dengan target yang direncanakan. Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Nilai Kinerja *Outcome*: Persentase Realisasi Indikator Kinerja
- Nilai Kinerja *Output*: Persentase Target Indikator Kinerja

Kriteria penilaian kinerja efektivitas adalah sebagai berikut:

- Jika rasio efektivitas $\geq 100\%$ berarti efektif
- Jika rasio efektivitas 85 s.d. 99% berarti cukup efektif
- Jika rasio efektivitas 65 s.d. 84% berarti kurang efektif
- Jika rasio efektivitas $< 65\%$ berarti sangat tidak efektif

Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2022 sebesar 91,95 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 83,22. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2022} = \frac{91,85}{83,22} \times 100\% = 110,49\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 kinerja Dishanpan Jateng dikatakan efektif karena capaian realisasi (*outcome*) melampaui target (*output*) yang telah ditetapkan sehingga rasio efektivitasnya menunjukkan angka di atas 100%, yakni 110,49%.

Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2023 sebesar 92,85 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 82,4. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2023} = \frac{92,85}{82,40} \times 100\% = 112,68\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2023 mencapai 112,68%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang efektif di tahun tersebut dan bahkan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Dishanpan Jateng berhasil melaksanakan program secara optimal dengan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2024 sebesar 88,17 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 82,5. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2024} = \frac{88,17}{82,50} \times 100\% = 106,87\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2024 mencapai 106,87%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2024 tergolong efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi tujuan strategis dan peningkatan pelayanan public tetap terjaga meski terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran pada tahun tersebut.

Kesimpulan Analisis Data

Berdasarkan hasil perhitungan selama tiga tahun (2022–2024), dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Data Berdasarkan konsep VfM

Tahun Anggaran	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
2022	Ekonomis (104,55%)	Tidak Efisien (115,81%)	Efektif (110,49%)
2023	Ekonomis (101,94%)	Tidak Efisien (115,44%)	Efektif (112,68%)
2024	Ekonomis (102,73%)	Tidak Efisien (109,81%)	Efektif (106,87%)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2022–2024, pengelolaan keuangan Dishanpan Jateng bersifat ekonomis dan efektif, namun belum efisien. Artinya, Dishanpan Jateng mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja, tetapi dalam penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal secara biaya. Hal ini menandakan bahwa terdapat potensi perbaikan dalam manajemen biaya dan alokasi anggaran agar kinerja yang tinggi dapat dicapai dengan tingkat efisiensi yang lebih baik di masa mendatang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan mengkaji lebih dalam hasil perhitungan kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) berdasarkan konsep *Value for Money* (VfM) yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019).

Konsep *Value for Money* digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode tahun 2022–2024, kinerja keuangan Dishanpan Jateng secara umum sudah ekonomis dan efektif, namun belum efisien. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun anggaran dapat digunakan secara hemat dan hasil kinerja telah mencapai bahkan melampaui target, penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal dibandingkan hasil yang diperoleh.

Pembahasan Aspek Ekonomis

Aspek ekonomis berfokus pada bagaimana Dishanpan Jateng mengelola anggaran untuk menghasilkan *output* yang diharapkan dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis, diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Tahun 2022: 104,55% (ekonomis)
2. Tahun 2023: 101,94% (ekonomis)
3. Tahun 2024: 102,73% (ekonomis)

Ketiga tahun tersebut menunjukkan rasio ekonomis di atas 100%, yang berarti bahwa pelaksanaan program Dishanpan Jateng dilakukan secara ekonomis. Anggaran yang

telah direncanakan mampu direalisasikan dengan penghematan tanpa menurunkan kualitas hasil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng berhasil melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran dengan baik. Hal ini tercermin dari konsistensi antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi penggunaannya, serta tidak adanya pemborosan dalam belanja kegiatan.

Selain itu, hasil ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Secara teoritis, hasil ini juga mendukung pandangan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa suatu instansi dikatakan ekonomis apabila dapat memperoleh input dengan harga serendah mungkin, tanpa menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, 2023 dan 2024, Dishanpan Jateng telah menunjukkan praktik pengelolaan anggaran yang ekonomis dan berorientasi pada efisiensi penggunaan dana publik.

Pembahasan Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi mengukur sejauh mana Dishanpan Jateng mampu menghasilkan *output* yang optimal dibandingkan dengan *input* yang digunakan. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa seluruh periode penelitian tergolong tidak efisien, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2022: 115,81% (tidak efisien)
2. Tahun 2023: 115,44% (tidak efisien)
3. Tahun 2024: 109,81% (tidak efisien)

Rasio yang melebihi 100% menunjukkan bahwa peningkatan capaian *output* belum diikuti dengan penggunaan *input* yang lebih hemat. Meskipun kinerja *output* meningkat setiap tahunnya, penggunaan anggaran masih relatif tinggi terhadap hasil yang dicapai. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun pengeluaran telah dilakukan dengan cermat, masih terdapat ruang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya pelaksanaan program.

Ketidakefisienan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Variasi biaya kegiatan antarprogram, terutama pada kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak luas seperti peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan stabilisasi harga bahan pokok.
2. Penyesuaian kebijakan daerah terhadap dinamika harga pangan dan prioritas pembangunan, yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan anggaran operasional.
3. Keterbatasan dalam inovasi anggaran berbasis kinerja, sehingga masih ditemukan ketidakseimbangan antara alokasi biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Namun demikian, kondisi tidak efisien ini tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk, karena dapat juga disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kelembagaan yang memerlukan tambahan biaya. Hasil ini mendukung temuan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa efisiensi bukan semata

soal penghematan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas dan nilai manfaat dari pengeluaran tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dishanpan Jateng telah mencapai hasil kinerja yang baik, optimalisasi efisiensi anggaran masih perlu ditingkatkan, misalnya melalui inovasi perencanaan berbasis hasil (*result-based budgeting*) dan penguatan sistem monitoring kinerja kegiatan.

Pembahasan Aspek Efektivitas

Aspek efektivitas menggambarkan sejauh mana output dan outcome dari kegiatan pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas Dishanpan Jateng pada periode penelitian menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu:

1. Tahun 2022: 110,49% (efektif)
2. Tahun 2023: 112,68% (efektif)
3. Tahun 2024: 106,87% (efektif)

Capaian efektivitas yang melebihi 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang direncanakan. Hasil ini menegaskan bahwa Dishanpan Jateng mampu mewujudkan sasaran kinerja yang diukur melalui indikator utama seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Nilai SKM, Indeks Ketahanan Pangan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian tersebut juga menggambarkan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan dan kepuasan publik di Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antarbidang di Dishanpan Jateng, serta dukungan kebijakan pemerintah provinsi yang konsisten dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Mahmudi (2019) bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana hasil yang dicapai mampu memenuhi target yang ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti Polii (2020) dan Wakhid Yulianto (2023) yang menemukan bahwa instansi pemerintah daerah umumnya telah mampu mencapai efektivitas tinggi meskipun efisiensinya belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dishanpan Jateng selama 2022–2024 sangat efektif, karena capaian program dan indikator kinerja utama secara konsisten melampaui target yang telah ditentukan.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh gambaran umum bahwa:

1. Aspek ekonomis: menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng mampu mengelola anggaran dengan hemat dan terkendali setiap tahun.
2. Aspek efisiensi: belum optimal, karena hasil capaian masih memerlukan biaya yang relatif tinggi dibandingkan output yang dihasilkan.
3. Aspek efektivitas: menunjukkan hasil yang sangat baik, karena seluruh indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang direncanakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Dishanpan Jateng memiliki tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), dengan keberhasilan utama pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Namun, untuk mencapai *Value for Money* yang ideal, diperlukan strategi peningkatan efisiensi di masa mendatang melalui:

1. Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Penguatan evaluasi kegiatan secara periodik dan terstruktur.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi biaya operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip *Value for Money* dengan baik, terutama pada aspek ekonomi dan efektivitas, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek efisiensi agar kinerja keuangan dapat lebih berimbang antara penghematan, produktivitas, dan hasil yang diperoleh di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) selama tahun 2022–2024 menggunakan pendekatan Value for Money (VfM), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Dishanpan Jateng selama periode 2022–2024 berada dalam kategori ekonomis, dengan rata-rata rasio di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dishanpan Jateng telah dilakukan secara efisien dari sisi biaya, di mana realisasi belanja dilakukan lebih hemat dari pada rencana tanpa mengurangi kualitas kinerja. Artinya, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Aspek Efisiensi

Kinerja efisiensi selama 2022–2024 menunjukkan hasil yang tidak efisien, namun terdapat tren positif menuju perbaikan. Rasio efisiensi yang terus menurun dari 115,81% pada tahun 2022 menjadi 109,82% pada tahun 2024 menandakan bahwa Dishanpan Jateng mulai mampu menekan biaya pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya. Walaupun belum mencapai kondisi ideal, tren ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam memperbaiki proses internal dan tata kelola keuangan.

3. Aspek Efektivitas

Capaian efektivitas menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten tinggi dengan nilai rasio selalu di atas 100% setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa target program dan kegiatan dapat dicapai, bahkan terlampaui. Artinya, pelaksanaan anggaran berhasil menghasilkan *outcome* atau manfaat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, seperti peningkatan ketahanan pangan, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dishanpan Jateng dalam tiga tahun terakhir tergolong ekonomis dan efektif, namun belum sepenuhnya efisien. Meskipun demikian, arah perkembangan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dan mengarah pada pengelolaan keuangan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip *Value for Money*. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta akuntabilitas keuangan yang semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, N., & Putri, A. (2015). Pengaruh efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja keuangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2025. Semarang: BPS.
- Bawole, J. N., Zawdie, G., & Kumi, E. (2017). Value-for-money audit for accountability and performance management in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 30(2), 101–121.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Erica, R., et al. (2024). Analysis of public sector financial performance using value for money. Kabupaten Tangerang.
- Hardiansyah, T. (2024). Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Maryanti, S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 115–125.
- Nasution, A., dkk. (2024). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan Value for Money pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Polii, F., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep Value for Money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 245–256.
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Analisis kinerja berdasarkan konsep Value for Money pada BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 22–31.
- Purwadinata, S. (2020). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan prinsip Value for Money (APBD Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Seran, M. S. B. (2021). Value for Money: Pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap

- pengelolaan keuangan Desa Subun Bestobe. *Jurnal Transparansi*, 3(1), 45–56.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas LKjIP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Polii, F., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep value for money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 245–256.
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Analisis kinerja berdasarkan konsep value for money pada BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 22–31.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wakhid, Y., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran kinerja melalui pendekatan value for money pada pelaksanaan anggaran Dinas “X” di sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 44–57.
- Widiastoeti, R., Ratnawati, & Nugroho. (2021). The role of value for money in public sector financial performance. *Journal of Public Administration*, 11(3), 77–90.
- Wiraguna, A., Pambelum, Y. J., & Umbing, G. B. (2024). Analisis Value for Money APBD Kabupaten Katingan Tahun 2018–2022. *Jurnal Ekonomi Publik*.